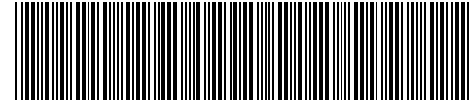




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.667797/2021**



DS:2054-1328-3023-0184

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
  3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
  4. Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 292.000.000 ( DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi  
013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 292.000.000  
Rp. 292.000.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	292.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 292.000.000

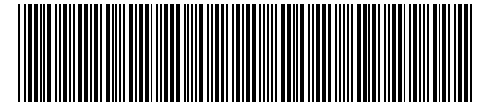
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2054-1328-3023-0184

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

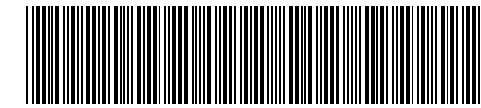
Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			292.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			292.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	25,00	Rekomendasi Kebijakan	275.275.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	25,00	Rekomendasi Kebijakan	275.275.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	13,00	Orang	16.725.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	13,00	Orang	16.725.000

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2021**



DS:2054-1328-3023-0184

**I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I B. 1

		Rp.		Ket :		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021		292.000.000		a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni		292.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB		0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung		0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS		0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2054-1328-3023-0184

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667797	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	292.000	-	-	-	292.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	292.000	-	-	-	292.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	292.000	-	-	-	292.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	275.275	-	-	-	275.275	34 . 51	
01	RM	-	275.275	-	-	-	275.275	178	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	16.725	-	-	-	16.725	34 . 51	
01	RM	-	16.725	-	-	-	16.725	178	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>292.000</b>	-	-	-	<b>292.000</b>		

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2054-1328-3023-0184

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

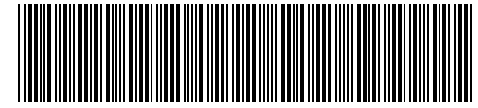
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667797	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	20.073	30.803	26.628	37.387	19.578	21.353	24.987	39.291	36.602	34.948	350	292.000
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	20.073	30.803	26.628	37.387	19.578	21.353	24.987	39.291	36.602	34.948	350	292.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	20.073	30.803	26.628	37.387	19.578	21.353	24.987	39.291	36.602	34.948	350	292.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	20.073	30.803	26.628	37.387	19.578	21.353	24.987	39.291	36.602	34.948	350	292.000

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2021  
IV A. B L O K I R**



DS:2054-1328-3023-0184

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT  
Kode dan Nama Satker : [667797] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

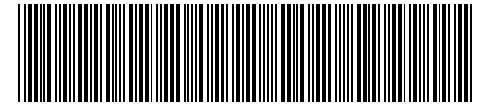
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2021  
IV B. C A T A T A N**



DS:2054-1328-3023-0184

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT  
Kode dan Nama Satker : [667797] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001